

INDIKATOR KINERJA OTONOMI DAERAH D.I. JOGJAKARTA

Pengantar Diskusi

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@map.ugm.ac.id

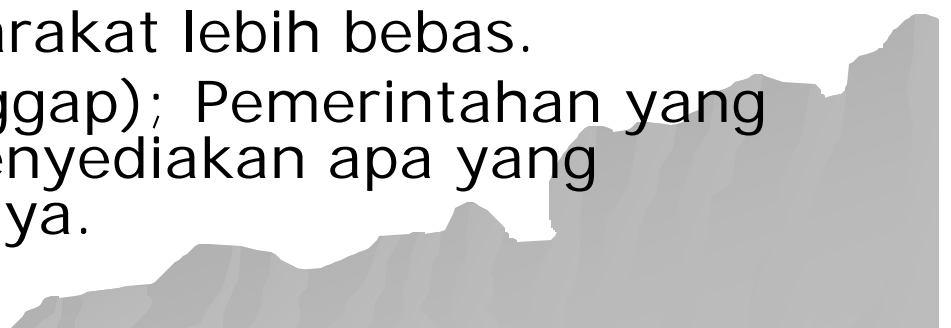


KONSEP DASAR DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

- ✍ Devolution / decentralisation: The transfer of functions or decision-making authority from the central government to local government (Cheema & Rondinelli, 1981).
- ✍ Otonomi daerah (local autonomy): kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004).

Otonomi Daerah dan Demokratisasi

1. Pendidikan politik; pemberian otonomi akan memberi peluang lebih besar bagi partisipasi politik
2. Melatih kepemimpinan politik; pemerintah daerah yang otonom akan memberi pengalaman mengenai sistem kepartaian, peran legislatif, metode formulasi kebijakan, dsb
3. Stabilitas politik; sistem pemerintahan yang terdesentralisasi akan memungkinkan terciptanya demokrasi yang stabil karena masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka percayai.
4. Persamaan politik; dengan menyediakan peluang partisipasi dalam pembuatan kebijakan, pemerintahan yang otonom akan menjamin persamaan politik warganya.
5. Akuntabilitas; Setiap hak individual akan lebih terjamin sehingga masyarakat lebih bebas.
6. Responsivitas (daya-tanggap); Pemerintahan yang otonom akan mampu menyediakan apa yang dikehendaki oleh rakyatnya.



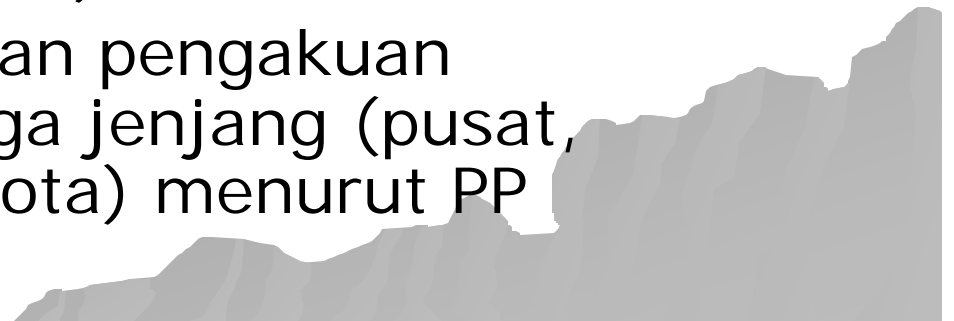
METODE PELIMPAHAN WEWENANG

- ✍ **“Ultra vires”** is basically used for denoting the situation where local governments “vires” (functions) are explicitly listed, and therefore any local government action outside this list would be deemed to be “ultra vires”, i.e. beyond the scope of allowed functions.
- ✍ **“General competence”**, on the other hand, is the principle that allows local governments to take whatever necessary actions in their territories, i.e. protecting citizens, providing services, and developing the regions. Under the “general competence” principle, local governments are free to take actions as long as they do not breach provisions in higher levels’ regulations. Ferrazzi (2002); Hoessein (2002)



Pelimpahan Wewenang di Indonesia

- Metode yang dianut adalah *general competence*, dengan sedikit modifikasi
- Perumusan kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan “kewenangan residual”, dengan rumusan eksplisit dimulai dari pemerintah pusat, yaitu: bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal, politik luar negeri, agama, justisi.
- Dalam peraturan lebih teknis, perumusan kewenangan didahului dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menurut PP No.25/2000).
- Perumusan berdasarkan pengakuan kewenangan dalam tiga jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota) menurut PP No.38/2007.



Apa indikator yang Tepat untuk menilai Kinerja Otda?

- ✍ Tata-pemerintahan (Kriteria Good Governance, Governance Assessment 2006)
- ✍ Kriteria Otonomi Award (Jawa Timur bersama Jawa Pos, 2007)
- ✍ Kriteria Kontekstual Daerah Istimewa Jogjakarta (Bappenas & MAP-UGM, 2007)

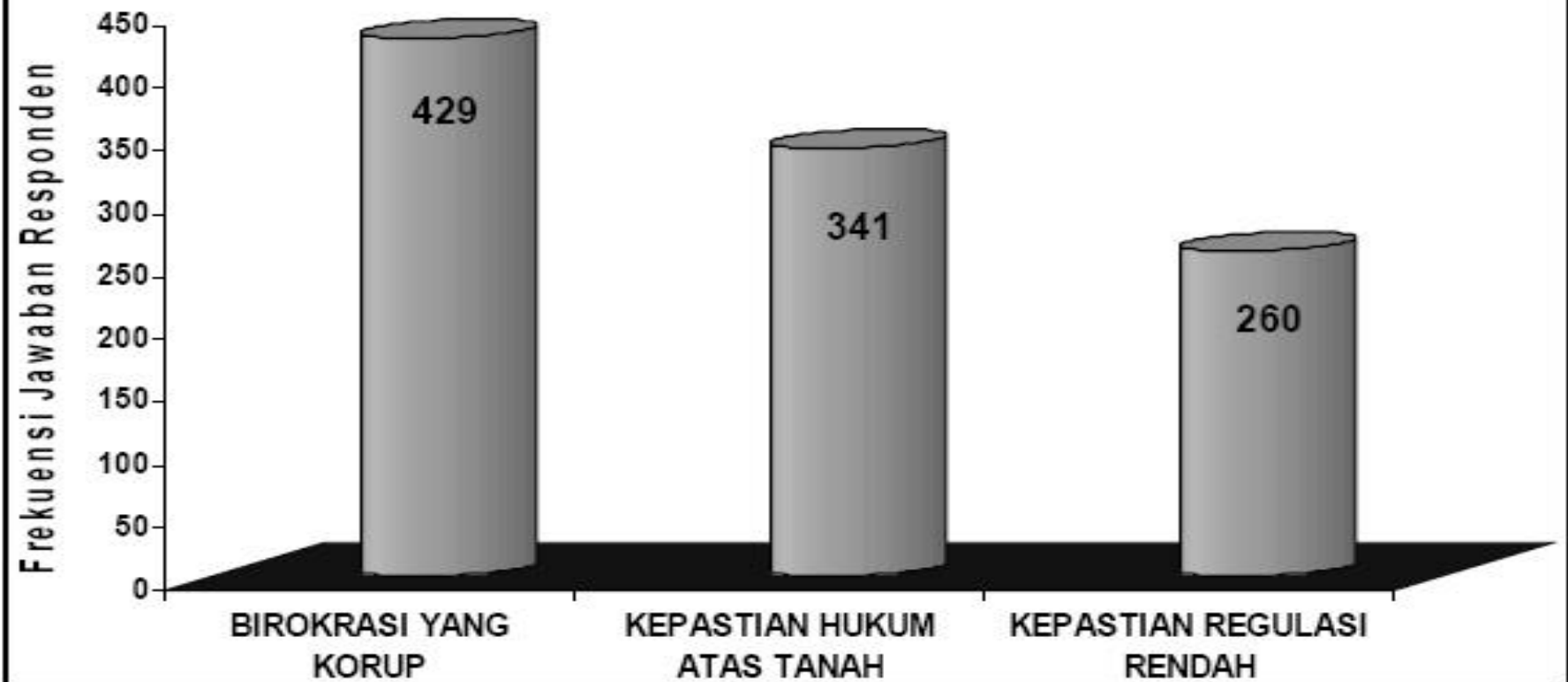


INDIKATOR GOVERNANCE ASSESSMENT

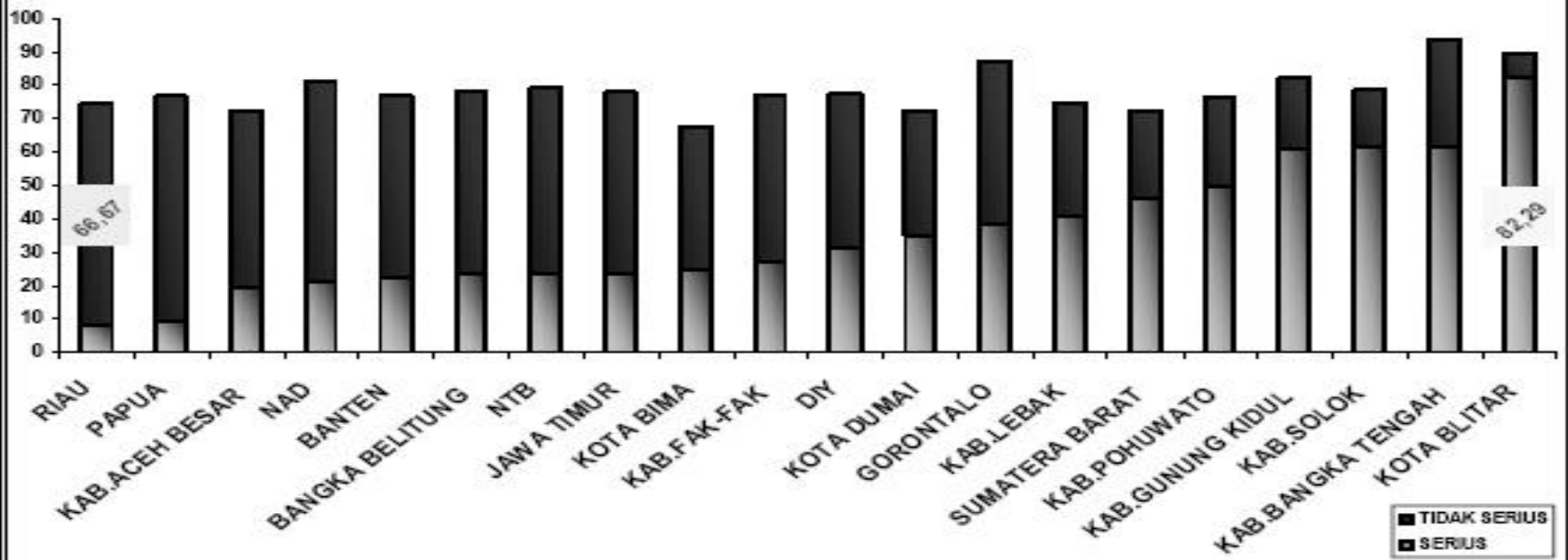
1. Kemampuan memenuhi hak politik warga; partisipasi, transparansi, kapasitas penyampaian aspirasi (*voice*)
2. Melaksanakan kebijakan & menyelenggarakan layanan publik; efisien, efektif, akuntabel?
3. Mengendalikan korupsi; insiden korupsi, toleransi masy.
4. Menjaga stabilitas politik; keamanan & ketertiban, mengelola konflik
5. Membuat Perda untuk pelayanan publik; kualitas peraturan, fasilitasi thd dunia usaha
6. Menegakkan hukum; kepastian, keadilan, kesamaan akses warga



FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN USAHA DI DAERAH



KESERIOUSAN INSTANSI / PEJABAT KEPALA DAERAH MEMBERANTAS KORUPSI



KRITERIA OTONOMI AWARD

1. Inovasi kebijakan; Apakah ada inovasi baru yg dilaksanakan pejabat daerah?
2. Layanan publik; kesehatan, pendidikan, perizinan
3. Pengembangan ekonomi; pertumbuhan, pemerataan, pemberdayaan
4. Kinerja politik lokal; partisipasi, akuntabilitas, kesinambungan politik.



Tabel 2. Rekapitulasi Tema Perda di Jawa Tengah 1999-2004

No.	Daerah	Kategori							Jumlah
		Kelembagaan	Keuangan	Pajak	Retribusi	Kesehatan	Tenagakerja	Lainnya	
1	Provinsi Jateng	12	13	6	17	3	4	17	72
2	Kota Semarang	7	11	8	9	2	1	8	46
3	Kudus	17	14	2	17	0	1	9	60
4	Pekalongan	17	11	5	12	0	1	5	51
5	Blora	11	7	2	13	1	2	0	36
6	Surakarta	9	14	1	14	2	0	4	44
7	Sragen	23	11	4	28	3	2	11	82
8	Purbalingga	27	15	2	15	2	3	5	69
9	Kebumen	20	10	1	25	2	1	29	88
10	Wonosobo	34	19	4	26	0	2	38	123
11	Cilacap	10	0	6	20	0	1	16	53
Jumlah		187	125	41	196	15	18	142	724

Sumber: Enny Nurbaningsih et al, Dinamika Implementasi Perda, 2006.

Kriteria Kontekstual Daerah Istimewa Jogjakarta

1. Apakah Pemda (provinsi, kab/kota) mampu memperbaiki kondisi ekonomi makro?
 - ✍ Pertumbuhan sektoral
 - ✍ Pertanian
 - ✍ Pendidikan & pariwisata
 - ✍ Kemakmuran rakyat
2. Apakah Pemda mampu mengatasi masalah di daerah?
 - ✍ Pengendalian tata-ruang
 - ✍ Konversi lahan
 - ✍ Masalah Sultan Ground
 - ✍ Masalah pencemaran lingkungan
3. Apakah Pemda mampu menggerakkan sektor andalan?
 - ✍ Pertumbuhan sektor pertanian
 - ✍ Pertumbuhan sektor pariwisata
 - ✍ Pertumbuhan sektor pendidikan
 - ✍ Adakah inovasi di sektor andalan yg lain?
4. Apakah Pemda mampu menyelenggarakan layanan publik dengan baik?
 - ✍ Kesehatan
 - ✍ Pendidikan
 - ✍ Perizinan



Tabel 1. Luas lahan terkonversi pada tahun 2005-2006 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Lokasi	Luas Tanah Terkonversi (Ha)
1	Kabupaten Gunung Kidul	200
2	Kabupaten Kulon Progo	150
3	Kabupaten Bantul	246
4	Kabupaten Sleman	328
5	Kota Yogyakarta	-
		924

Sumber: diolah dari Kantor BPS Provinsi DI Yogyakarta.

